

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 07 Januari 2011

Subyek : Bencana Alam

Hal : 22

Korban Gempa Tuntut Pembagian Dana Bantuan

Tasikmalaya, Kompas - Warga Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menghendaki dana bantuan gempa yang tersisa sebesar Rp 34 juta segera dibagikan. Selain itu, menuntut kepala desa yang menyalahgunakan dana bantuan korban gempa mengganti sejumlah dana yang diselewengkan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarapih, Atang Suryana, mengemukakan hal itu, Kamis (6/1). "Pokoknya, warga ingin sisa dana Rp 34 juta itu dibagikan sesegera mungkin kepada korban. Nanti pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat akan bermusyawarah memutuskan mekanisme pembagiannya," katanya.

Sementara ini, kata Atang, ada ide untuk membagi rata sisa dana bantuan korban gempa tersebut kepada korban yang rumahnya rusak berat maupun sedang. Tapi, kepastiannya menunggu hasil musyawarah.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Desa Sukarapih, Yana Suryana, mengaku sebagian besar dana bantuan untuk korban gempa di Desa Sukarapih telah disalahgunakan. Bantuan yang totalnya Rp 185 juta ternyata hanya diberikan kepada 2 dari 18 korban gempa (Rp 19 juta).

Sebanyak Rp 77 juta lainnya dibagi-bagikan kepada oknum aparat pemerintah dan oknum wartawan. Sekitar Rp 55 juta lagi digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain menutupi target pajak bumi bangunan desa (Rp 17 juta), perbaikan komputer desa (Rp 5 juta), pembayaran beras untuk keluarga miskin (Rp 5 juta), kegiatan olahraga (Rp 1 juta), dan keagamaan (Rp 1 juta). Yang tersisa saat ini tinggal Rp 34 juta.

Dalam pertemuan dengan warga, Rabu lalu, Yana berjanji akan mengembalikan dana bantuan untuk korban gempa yang disalahgunakan setidaknya dalam tiga bulan ke depan. Khususnya, kata Yana menekankan, yang digunakan untuk raskin dan pajak bumi dan bangunan.

Tanpa musyawarah

Menurut Atang, keputusan penggunaan dana bantuan korban gempa di luar peruntukannya, tidak pernah dimusyawarahkan dengan BPD atau masyarakat. "Ini murni kesalahan kepala desa. Sekarang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi," katanya.

Menanggapi masalah ini, Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna, Hermansyah, mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap temuan penyelewengan dana bantuan korban gempa ini. "Sejak awal, kami sudah sering memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, termasuk kelompok masyarakat korban bencana. Tapi, ternyata masih ada saja praktik pencairan yang menyimpang," ujarnya.

Selain di Sukarame, Kejari Singaparna pun telah mendapat informasi kasus serupa di Kecamatan Cigalontang dan Cisayong. Menurut Hermansyah, munculnya kisruh penyelewengan dana bantuan korban gempa tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. (ADH)